

Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru

Waddha¹ Hendry Andry²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
waddha@student.uir.ac.id hendryandry@soc.uir.ac.id

Received : 14 Juni 2025

Abstract

This study aims to determine the Implementation of the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Policy at the Pekanbaru City Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) and to find out the factors inhibiting the implementation of the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Policy at the Pekanbaru City Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP). This type of research uses descriptive with qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The key informants and informants in this study are the Service Secretary, the Head of the General Subdivision, the Head of the Investment Monitoring and Development Section, Micro-scale Restaurant Business Actors who have business licenses and Micro-Scale Restaurant Business Actors who do not have business licenses. The key withdrawal technique of informants and informants in this study uses Snowball Sampling. The results of this study show that the implementation of the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) policy at the Pekanbaru City Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) has not been implemented optimally. Because there are several obstacles including lack of budget resources, lack of supervision of business actors, lack of sanctions given to business actors, lack of understanding of technology among business actors, lack of socialization, and the social environment is not yet conducive.

Keywords: *Implementation, Policy, Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Tipe Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Key informan dan informan pada penelitian ini ialah Sekretaris Dinas, Kasubag Umum, Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal, Pelaku Usaha Rumah Makan skala mikro memiliki izin usaha dan Pelaku Usaha Rumah Makan Skala Mikro yang tidak memiliki izin usaha. Teknik penarikan key informan dan informan pada penelitian ini menggunakan Snowball Sampling. Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal. Karena terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya sumberdaya anggaran, kurangnya pengawasan terhadap Pelaku Usaha, kurangnya sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha, kurangnya pemahaman teknologi dikalangan pelaku usaha, kurangnya sosialisasi, serta belum kondusifnya lingkungan sosial.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*

Pendahuluan

Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan dan penilaian kebijakan (Winarno, 2011:51). Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pengimplementasiannya.

Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan Bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat warganya. Setiap Pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan Masyarakat oleh Lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Thomas Dye, 2017).

Pentingnya perizinan berusaha sebagai legalitas suatu usaha negara merupakan perwujudan perizinan yang sah secara hukum diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi. Mulainya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya suatu perizinan berusaha yang akan membawakan dampak positif terhadap kemajuan dan perkembangan usaha. Oleh karena itu, masyarakat mulai menganggap bahwa perizinan berusaha dianggap sebagai instrumen legalitas dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kepemilikan, dimana instrument tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga mempunyai dasar dan aturan yang jelas (Assegaf, 2019). Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dengan kata lain, Pelaku Usaha tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sebelum seluruh persyaratan perizinan berusaha terpenuhi.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan untuk menyelenggarakan perizinan berusaha yang efektif dan efisien, maka pemerintah membuat terobosan di bidang perizinan berusaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal juga dengan Online Single Submission (OSS). Dalam perkembangannya, sistem OSS 1.0 tersebut diperbarui menjadi OSS 1.1 karena masih terdapat sejumlah kekurangan, namun salah satu perubahan yang memberikan dampak besar adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut mengamanatkan dilaksanakannya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) memberikan pembaruan terhadap sistem OSS yang sudah ada. Versi pembaruan dari OSS 1.1 ini disebut juga dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kedua peraturan pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, karena di dalamnya telah diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pada Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Provinsi Riau sendiri diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dimana menjelaskan mengenai pedoman operasional bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Maka beberapa daerah akan terus meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dengan menerapkan Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Di Provinsi Riau, salah satu Kabupaten/Kota yang sudah Mengimplementasi kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sesuai regulasi yang telah ditetapkan pada Kota Pekanbaru. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru termasuk hal nya dalam Pengimplementasian Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau disebut Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) juga diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: KTPS.126/DPMPTSP/2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dapat membantu pelaku usaha mulai dari permohonan perizinan sampai penerbitan perizinan usaha secara online. Adapun Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) mulai diterapkan oleh pemerintah pusat pada 2 Juli 2021 berdasarkan Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. Sedangkan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mulai diterapkan pada 5 Agustus 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) merupakan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan. Adapun pada penyelenggaraan perizinan berusaha dengan menerbitkan perizinan berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.

1. Tingkat Risiko Rendah dengan jenis perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pernyataan Jaminan Halal.
2. Tingkat Risiko Menengah Rendah dengan jenis perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri.
3. Tingkat Risiko Menengah Tinggi dengan jenis perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

4. Tingkat Risiko Tinggi dengan jenis perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang wajib disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah sebelum melakukan kegiatan usaha, Sertifikat Standar jika dibutuhkan

Perizinan dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah cukup diselesaikan melalui sistem OSS RBA tanpa membutuhkan verifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, sehingga perizinan dapat terbit otomatis pada sistem ini. Berbeda dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi melibatkan instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pihak yang berwenang untuk memverifikasi perizinan sesuai dengan jenis perizinan yang ditetapkan.

Kriteria skala usaha dalam pengurusan perizinan berusaha termuat dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. Adapun kriteria skala usaha terdiri dari:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan kriteria skala usaha diatas, bahwa tidak hanya skala besar saja yang harus memiliki perizinan usaha, namun UMKM juga wajib memiliki perizinan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada pasal 37 ayat 1 menjelaskan bahwa:

"Usaha mikro, kecil dan menengah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha"

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 6 ayat 2 yaitu penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) meliputi Sektor Kelautan Dan Perikanan, Sektor Pertanian, Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sektor Ketenaganukliran, Sektor Perindustrian, Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Sektor Perdagangan, Sektor Transportasi, Sektor Kesehatan, Obat Dan Makanan, Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, Sektor Pariwisata, Sektor Keagamaan, Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran Dan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Sektor Pertahanan dan keamanan, Sektor Ketenagakerjaan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 6 ayat 2 dapat diketahui bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko salah satunya

meliputi Sektor Pariwisata. Pada penelitian ini peneliti mengfokuskan pada sektor Pariwisata di Kota Pekanbaru. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun jenis kegiatan usaha pada sektor pariwisata yang paling banyak Di Kota Pekanbaru termuat Rumah/Warung makan, Hotel, Pondok Wisata, Penginapan Remaja, Bumi perkemahan, villa, Penyediaan Akomodasi, restoran, kedai makanan, penyediaan makanan dan minuman keliling/tempat tidak tetap, Rumah minum/caffe dan lain-lain. Dari berbagai jenis kegiatan usaha pada sektor pariwisata diatas, yang paling tinggi pendaftaran pada 2023 di sistem OSS RBA adalah jenis kegiatan usaha Rumah/warung makan dengan KBLI 56102 sebanyak 1114 perizinan Rumah Makan.

Fokus pada rumah makan skala mikro juga relevan karena masih banyak potensi yang belum tergali maksimal dalam mendukung perkembangan pariwisata di Pekanbaru. Adapun alasan peneliti memilih penelitian ini di Kecamatan Marpoyan Damai ialah dimana pada tahun 2023 tingginya pendaftaran perizinan Rumah/Warung makan skala mikro pada sistem OSS RBA daripada kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 250 yang terdaftar pada OSS RBA. Namun berdasarkan observasi peneliti di Kecamatan Marpoyan Damai, masih ditemukan Rumah Makan pada skala mikro yang belum memiliki izin usaha. Ketika penulis melakukan observasi di Kecamatan Marpoyan Damai, beberapa Rumah Makan skala mikro menyebutkan bahwa mereka tidak mengurus izin usaha dengan alasan tidak mengetahui adanya kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan tidak ada sanksi tegas maupun peringatan yang diberikan selama tidak mengurus izin usaha nya. Sehingga menyebabkan Pelaku Usaha merasakan tidak penting terhadap perizinan usaha. Tidak hanya itu, Pelaku Usaha pada Rumah Makan skala mikro di Kecamatan Marpoyan Damai menganggap bahwa usaha yang mereka jalankan hanya usaha rumahan kecil-kecilan sehingga belum perlu melakukan perizinan usaha sehingga tidak mengetahui arti pentingnya perizinan usaha hal ini menunjukkan belum kondusifnya lingkungan sosial.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Pasalong dan Harbani (dalam Nurman, 2023:27) administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Menurut Hadari Nawawi (dalam Syafiie, 2003:5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah di tetapkan sebelumnya.

Menurut Yussa dan Hendry (2015:10) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan Administrasi (dalam Roza dan Andry ,2015:201), adalah kegiatan yang sangat memberikan bantuan dalam mengelola manusia, mengelola informasi, dan harta benda untuk suatu tujuan yang diinginkan.

Konsep Administrasi Publik

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Nurman, 2023:32) administrasi publik merupakan administrasi daripada negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar

tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. George J. Gordon (dalam Syamsuddin, 2010:117) mendefinisikan administrasi publik merupakan keseluruhan proses baik yang dilakukan oleh organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan peradilan.

Menurut Marshall Edward Dimock & Gladys Ogden Dimock (dalam Syafri Wirman, 2012:22) mendefinisikan administrasi public sebagai penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian administrasi publik bukan sekedar Teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (policy) karena dalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok didalam pemerintahan.

Konsep Organisasi

Menurut Siagian (dalam Yussa dan Hendry 2020:16) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terhadap seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Organisasi (dalam Roza dan Andry 2015:201) adalah sistem usaha kerjasama sekelompok orang yang terikat secara formal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sitha Hajar Malawat (dalam Widyanti dan Al Hafis, 2024:1422) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Menurut Zulkifli (dalam Setiawan dan Kartius, 2024:1296) Organisasi suatu proses identifikasi dan pembentukan dan pengelompokan kerja, mendefinisikan dan mendelegasikan wewenang maupun tanggung jawab dan menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam menuju tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas.

Konsep Manajemen

Menurut Terry (dalam Nurman, 2023:126) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut Salam (dalam Putera dan Zubaidah, 2024:1221) manajemen adalah Upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran negara.

Manajemen (dalam Sakinah dan Andry, 2024:632) adalah suatu bentuk proses yang dilakukan Bersama orang lain yang dapat memudahkan suatu pekerjaan yang dalam penerapannya memiliki proses yang khas, terdiri dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengawasan, kepemimpinan dan koordinasi yang pelaksanaannya dilakukan secara berurutan sesuai masing-masing tindakan serta

dibutuhkannya suatu pengetahuan yang spesifik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Widiani (dalam Meifora dan Suriani, 2024;1312) Manajemen sebagai ilmu dan seni dapat diartikan sebagai Upaya pencapaian tujuan manajemen dengan pendekatan (approach) menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala-gejala manajemen serta mentransformasikan dan mengidentifikasi proses manajemen berdasarkan kaidah ilmiah.

Konsep Kebijakan Publik

James Anderson (dalam Agustino, 2014;7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, "serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan."

Menurut Sulaiman (dalam Silpiani dan Andry 2024;562), Kebijakan publik adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat Keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus, dengan demikian maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan. Kebijakan publik menurut Ramdhani (dalam Rosmita & Herman dkk, 2020;211) adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

Konsep Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dapat memuat aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016;133) adalah tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau pejabat pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam Keputusan kebijakan. Menurut Wesra (dalam Meilissa dan Andry, 2024;261) Mendefinisikan implementasi sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu mulainya.

Konsep Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)

Berbeda dengan perizinan berusaha sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang saat ini berlaku (OSS Versi 1.1), sistem perizinan berusaha akan bertransformasi menjadi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), sesuai dengan yang diatur dalam Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya

yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Perbedaan dengan sistem OSS 1.1 yang tidak mendasarkan perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, sistem OSS RBA ini nantinya akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha. Tingkatan risiko Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, maka terdapat klasifikasi risiko kegiatan usaha, diantaranya (Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021): Kegiatan Usaha dengan tingkat risiko rendah; Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Sektor Usaha OSS-RBA OSS-RBA ini berlaku bagi 16 sektor usaha, diantaranya (Pasal 5 ayat (1) Perka BKPM 4/2021): Kelautan dan perikanan Pertanian Lingkungan hidup dan kehutanan Energi dan sumber daya mineral Ketenaganukliran; Perindustrian; Perdagangan; Pekerjaan umum dan perumahan rakyat; Transportasi; kesehatan, obat dan makanan; Pendidikan dan kebudayaan; Pariwisata; Keagamaan; Pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik; Pertahanan dan keamanan; Ketenagakerjaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Sedangkan metode deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian sekaligus juga pembahasan mengenai dari tanggapan Informan Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Untuk pembahasan yang lebih jelas mengenai hasil dan pembahasan penelitian dapat dilihat seperti berikut :

Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter Dan Van Horn, indikator ini menguji sejauh mana Langkah-langkah dasar dan tujuan kebijakan telah dilaksanakan. Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Kinerja suatu implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang ada ditingkat pelaksana. Sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik ialah apabila antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai (Hilmi, 2023:158).

Berdasarkan Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dilapangan, bahwasanya ukuran dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS

RBA) sudah jelas dan sudah terealisasi tingkat keberhasilannya, mulai dari peningkatan penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) pada tahun 2023 sebanyak 21.245 Penerbitan NIB, peningkatan realisasi investasi pada tahun 2023 sebanyak 6,5044 T dan kepuasan Masyarakat selaku pelaku usaha yang merasakan keberhasilan maupun manfaat dari kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Kemudian tujuan dari Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) telah tercapai dan jelas adanya ialah untuk mempermudah Pelaku Usaha mendapatkan izin usahanya dengan mudah dan cepat serta tanpa harus datang ke kantor secara langsung dan bisa dilakukan dimana saja. Hal ini telah sejalan dengan tujuan kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko pada pasal 3 yaitu dapat meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha poin (a) yang menyebutkan melalui “Pelaksanaan penerbitan dan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana”.

Dengan kemudahan berusaha ini, diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi khususnya di Kota Pekanbaru. Namun demikian, masih ada juga yang datang ke kantor, padahal dengan mekanisme Oss Rba tidak perlu lagi datang ke kantor sehingga dapat memudahkan Masyarakat untuk menunggu antrian. Tidak hanya itu, masih ada juga Pelaku Usaha yang belum mengetahui adanya kebijakan Oss Rba dan tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan dan manfaat kebijakan ini.

Sumberdaya

Menurut pakar Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2014;141-144) keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan ada terdapat sumber daya manusia/staf. Diluar sumber daya manusia terdapat sumber daya lainnya yang dapat diperhitungkan juga, yaitu sumber daya anggaran(financial), dan sumber daya sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, Jumlah staf sudah cukup memadai dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Tidak hanya itu para staf sudah sangat tanggap, cepat dan baik dalam membantu pelaku usaha jika ada yang mengalami kesulitan dalam mengakses Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Namun demikian, tetap harus adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dengan diberikannya pelatihan bagi staf/pegawai agar lebih baik lagi dalam membantu Pelaku usaha serta agar dapat melakukan pendampingan dilapangan kepada Pelaku Usaha.

Kemudian kurangnya ketersediaan sumberdaya anggaran dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku usaha belum terlaksana dengan maksimal. Selanjutnya adapun ketersediaan

Sumberdaya Sarana dan Prasarana sudah cukup memadai dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Pelaku usaha yang mengurus perizinan oss rba secara langsung juga merasa nyaman dengan sarana dan prasarana tersebut. Tidak hanya itu, dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, sangat membantu pelaku usaha agar bisa langsung ke kantor melakukan pendaftaran izin usaha tanpa harus mencari perangkat sendiri. Karena tidak semua pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menggunakan teknologi dan internet.

Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2014:141-144) bahwa kinerja implementasi kebijakan publik akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan bahwasanya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru selaku pelaksana Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Nomor 125 tahun 2023 yang memuat semua alur perizinan terutama mengenai Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba). Dan semua pegawai sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah ada. Namun masih ada pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) karena tidak semua pelaku usaha mengetahui kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara, bahwa kurangnya pengawasan terhadap Pelaku Usaha rumah makan skala mikro dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Dimana masih kurang melakukan pengawasan kebijakan baik kepada pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha maupun pelaku usaha rumah makan skala mikro yang belum memiliki izin usaha. Dampaknya masih banyak ditemukan pelaku usaha Rumah makan skala mikro belum menerbitkan izin usaha karena pengawasan dilakukan masih dikatakan kurang. Begitupun dengan masih kurangnya sanksi dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Dimana Pelaksana kebijakan selaku Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru kurang memberikan sanksi kepada pelaku usaha rumah makan skala mikro yang tidak memiliki izin. Hal ini menyebabkan pelaku usaha rumah makan

skala mikro yang tidak acuh atau peduli pentingnya izin usaha, dan mereka tidak menyadari besar manfaat ketika usaha yang mereka jalani sudah terdaftar izin nya terutama di OSS RBA.

Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam agustino, 2006:94) ialah penerimaan atau penolakan agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang diterapkan bukanlah hasil perumusan warga setempat yang paham betul dengan permasalahan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti lapangan bahwasanya, respon pelaksana selaku pegawai sudah melihatkan respon penerimaan yang baik terhadap dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Tidak hanya pegawai, namun pelaku usaha rumah makan skala mikro baik yang sudah memiliki izin usaha dan tidak memiliki izin usaha juga menerima baik adanya kebijakan Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba). Adapun juga Pemahaman Pelaksana selaku Pegawai sudah baik dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Dimana Pegawai sudah mendapatkan pelatihan dari Kementerian Investasi/BKPM selaku pemerintah Pusat. Dan mereka mendapatkan sertifikat pelatihan yang menjadi bentuk bukti bahwa pegawai memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, masih terdapat kurangnya pemahaman dan keterampilan teknologi dikalangan Pelaku usaha.

Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn apa yang menjadi ukuran tujuan harus dipahami oleh para individu. Komunikasi yang baik merupakan salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tujuan kebijakan akan terwujud apabila suatu komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan yang diimplementasikan bisa dikoordinasikan dengan bagian yang tepat, selain itu komunikasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut juga harus akurat dan konsisten.

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi peneliti lapangan bahwasanya Koordinasi Dan Kerjasama Antar Organisasi dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sudah dilakukan. Dimana Pelaksana kebijakan selaku Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru melakukan koordinasi berbagai pemangku seperti Kementerian, dinas terkait, pegawai serta Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Namun masih kurangnya koordinasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dengan Kecamatan yang ada di Pekanbaru. Adapun juga masih kurangnya Sosialisasi dalam Implementasi

Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).Dimana Pelaksana kebijakan selaku Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru hanya melakukan sosialisasi dengan cara mengundang asosiasi umkm secara terbatas dan sosialisasi juga sudah dilakukan melalui media sosial.Namun demikian,sosialisasi masih kurang merata dilakukan diakibatkan masih kurangnya anggaran

Lingkungan Sosial,Politik dan Ekonomi

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Hon adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang termaksud lingkungan sosial,ekonomi,dan politik.Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan .Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi dilapangan,bahwasanya belum kondusifnya lingkungan sosial dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) karena pelaku usaha berpikir bahwa usaha yang mereka jalankan hanya kecil-kecilan sehingga tidak perlu urus izin usaha.Tidak hanya itu,masih banyak nya pelaku usaha yang tidak mengerti teknologi sehingga menunjukkan bahwa lingkungan sosial mereka belum optimal.Kemudian sudah kondusifnya lingkungan ekonomi dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA),baik itu kondisi ekonomi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Hal ini juga kondisi ekonomi pelaku usaha yang masih cenderung menjalankan usaha dengan modal terbatas dan minimnya penggunaan teknologi.

Namun dengan adanya Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA),mengurus perizinan usaha tidak ada mengeluarkan biaya/gratis dan jika pelaku usaha tidak memiliki akses teknologi untuk mengakses OSS RBA bisa langsung datang ke kantor yang didampingi oleh Pegawai Layanan Helpdesk OSS RBA.Adapun selanjutnya sudah kondusifnya lingkungan politik dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).Dukungan elit politik,selaku pemerintah pusat dan daerah telah memberikan dukungan dalam bentuk alokasi anggaran,pelatihan dan sosialisasi.Namun masih ada pelaku usaha yang belum merasakan dukungan pemerintah karena sosialisasi dilakukan belum merata.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa belum terlaksana secara maksimal, ,dikarenakan terdapat sub indikator dari 6 indikator yang ada dalam proses implementasi yang belum terlaksana dengan baik.dimana indikator sumberdaya pada sumberdaya anggaran yang masih kurang dalam menunjang Implementasi

Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), pada indikator karakteristik agen pelaksana dimana pengawasan terhadap pelaku usaha yang masih kurang, kemudian juga masih kurangnya sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha. Pada Indikator sikap atau kecenderungan para pelaksana, dimana masih kurangnya pemahaman teknologi dikalangan pelaku usaha, kemudian pada indikator komunikasi antar badan pelaksana, dimana masih kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha sehingga masih ada pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Terakhir pada indikator lingkungan sosial, ekonomi dan politik, pada subindikator kondusifnya lingkungan sosial yang belum kondusif yang membuat implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) belum berjalan maksimal.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Andry, H., & Tarmizi Yussa. (2020). *Perilaku & Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Kartiwa, A. (2012). *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurman, Al Sukri, & Suryani, L. (2023). *Teori Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- P. Robbins, S., & A. Judge, T. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- P. Siagian, S. (2000). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- P. Siagian, S. (2012). *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- P. Siagian, S. (2020). *Teori Dan Praktek Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Toko Buku Gunung Agung.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun

Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.

Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.

Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.

Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).

Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.

Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.

Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.

Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

Waddha dan Hendry Andry

- Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.

- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.

- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).

- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Priansa, D. J., & Garnida, A. (2020). *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, A., & Juwono, V. (2019). *Birokrasi & Governance*. Depok: Grafindo Persada.
- Syafiie, I. (2003). *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Zulkifli, Awang, A., Rifa'i, A., Emrizal, Suriani, L., Andry, H., & Rosmita. (2013). *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR
- Rosidah, D. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik*, 234-248.
- Rosidi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Oss Rba) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Semarang. *Journal Unsub*, 75-85.
- Sutisnawinata, A., Arenawati, & Riswanda. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Kota Serang. *International Journal Of Demos*, 200-211.
- Muhammad Syarif, Hartono, B., & Isnaini. (2023). Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal Of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 3102-3111.
- Syabanita, S., Zain, D., & Arisandra, O. (2021). Izin Industri, Bagaimana Implementasinya ? *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 181-189.
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504-511.

- Yundrina, L. (2023). Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) Di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. *Journal On Education*, 9855-9868.
- Syafriadi, S. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1081–1088.
- Bahroni, R., Rumbekwan, M., Ginting, A. H., Ir, J., Km, S., Barat, J. J., & Koperasi, P. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR Institut Pemerintahan Dalam Negeri IMPLEMENTATION OF POLICY FOR LICENSING OF SMALL M.* 12(1), 71–85.
- Dayantri, D. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Sumatera Utara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 617–626.
- Revanza Salsa Bilita, Fazriyan Nurazmi, & Indra Prasta. (2023). Implementasi Sistem Online Single Submission Risked Based Approach (OSS RBA) Di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang. *CiDEA Journal*, 2(2), 13–19.
- Meillissa, A., & Andry, H. (2024). Pelaksanaan Program Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Oleh Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Riau Kota Pekanbaru. *Journal Of Public Administration Review*, 258-271.
- Isnaeni, R., & Andry, H. (2023). Pengawasan Peredaran Barang Elektronik Wajib SNI Oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau (Studi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru). *Jurnal Komunting* , 913-927.
- Setiawan, M., & Kartius. (2024). Implementasi Program Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. *Journal of public administration review*, 1290-1309.
- Lestari, Arenawati, & Stiawati. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DPMPPTSP KABUPATEN SERANG. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 243-252.
- Andry, W. R. (Oktober 2015). Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Pada Badan Seksi Pelayanan Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru. *Jurnal Valuta Vol 1 No.2*, 353-367.
- D. P., & H. A. (2019). Pelaksanaan Standar Kesetaraan Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Pada Bus Trans Metro Pekanbaru. *Publika*, 55-71.
- Sakinah, S. F., & Andry, H. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat Sekolah Dasar Penggerak Kota Pekanbaru. *Journal of public administration review*, 628-650.
- Silpiani, R., & Andry, H. (2024). Pelaksanaan Program Puskesmas Ramah Anak Pada Puskesmas Simpang Tiga Kota Pekanbaru. *Journal Of Public Administration Review*, 560-573.
- Zubaidah, E., Lubis, E. F., Andry, H., & Khadijah, A. S. (2023). Implementasi E-Goverment Pada Layanan Red Rose Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Trias Politika*, 157-166.
- Lubis, Krisdianto, & Litsyani. (2024). Kajian Keberhasilan Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Base Approach (OSS-RBA) Di DPMPPTSP Kabupaten Ketapang Pada Perusahaan Perkebunan. *Jurnal Argo Industri Perkebunan*, 91-104.

- Amar. (2022). IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH PADA DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 46-57.
- Herza, & Handrian. (2024). Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Penurunan Stunting Oleh Puskesmas Limapuluh kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 44-55
- Rosmita, Herman, & Lubis. (2020). Alternatif Kebijakan Model Penyaluran Dana Fee Alam Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Kamunting*, 204-223.
- Putra, G. R., & Zubaidah, E. (2024). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pembinaan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru. *Journal of public administration review* , 1219-1235.
- Siahaan, N., & Andry, H. (2024). Efektivitas Penerapan Layanan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Secara E-Registration Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan. *Journal of ublic aadministration*, 1385-1406.
- Widyanti, S., & Iman, R. A. (2024). Implementasi Program Gerakan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) Dalam Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Wilayah Kerja Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru. *Journal of public administration*, 1421-1434
- Fitriyani& Iman, R. A. (2024). Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. *Journal of public administration*, 1006-1023.

Webiste

Dpmptsp.pekanbaru.go.id

Antara.Com

Dokumentasi :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 169 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Waddha dan Hendry Andry

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 125 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 126 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata.